

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ERA COVID-19: PENYELAMATAN DAN KERJASAMA

Asep Setiawan^{1,*}

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

*Email: asep.setiawan@umj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik luar negeri Indonesia di era pandemi Covid-19. Berdasarkan karakter dari politik luar negeri Indonesia yang menempatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI), terdapat dua kebijakan luar negeri yang menonjol. Pertama, Indonesia memprioritaskan penyelamatan WNI di luar negeri di tempat yang terkena pandemi Covid-19 dengan jalan repatriasi besar-besaran. Kedua, masih dalam karakter untuk penyelamatan WNI, Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan China dan pihak swasta asing lainnya dalam pencarian vaksin anti Covid-19. Vaksin ini diharapkan pada tahun 2021 dapat menyelamatkan warga negara yang berada di dalam dan luar negeri Indonesia. Dua fenomena itu menjadi ciri dari pelaksanaan politik luar negeri di bawah pemerintahan Joko Widodo selama Covid-19 ini.

Kata Kunci: Covid-19, Politik Luar Negeri, Indonesia, Pandemi, China, Repatriasi

ABSTRACT

This article aims to examine Indonesia's foreign policy in the era of the Covid-19 pandemic. Based on the character of Indonesia's foreign policy which places the protection of Indonesian citizens (WNI), there are two foreign policies that stand out. First, Indonesia has prioritized rescuing Indonesian citizens abroad in places affected by the Covid-19 pandemic by means of massive repatriation. Second, still in the character of saving Indonesian citizens, Indonesia has established bilateral cooperation with China and other foreign private parties in the search for an Covid-19 vaccine. This vaccine is expected to be able to save citizens who are both inside and outside Indonesia by 2021. These two phenomena have characterized the implementation of foreign policy under Joko Widodo administration during Covid-19.

Keywords: Covid-19, Foreign Policy, Indonesia, China, Pandemic, Repatriation

PENDAHULUAN

Politik Luar Negeri Indonesia sejak Joko Widodo menjadi presiden disebut sangat *inward looking* lebih mementingkan dalam negeri (Situmorang: 2015). Tidak hanya karena Presiden Joko Widodo dianggap tidak berpengalaman dalam masalah luar negeri tetapi juga karena ideologi yang dibawa partai yang mendukungnya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih mementingkan isu dalam negeri. Dengan kata lain ada pandangan bahwa pelaksanaan politik luar negeri di bawah pemerintahan Jokowi berorientasi kepada kepentingan dalam negeri terutama melindungi warga negara Indonesia di luar negeri (Rosyidin: 2017).

Pandangan lain menyebutkan bahwa politik luar negeri era Jokowi memberikan ruang yang besar terhadap antara lain dua isu penting yakni isu poros maritime dunia (*global maritime axis*) dan diplomasi ekonomi (*economic diplomacy*) (Weatherbee : 2016) . Keduanya juga sama diabdikan untuk memperkuat kepentingan Indonesia di dalam negeri. Dalam konteks membangun poros maritim dunia misalnya disebutkan programnya memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas selain mengelola kekayaan laut Indonesia.

Politik luar negeri Jokowi juga akan bersifat pragmatis dengan tidak terlalu jelas dalam isu-isu luar negeri, tidak akan banyak kepemimpinan dimainkan Jokowi dan reaksi terhadap pertikaian internasional lebih nasionalis (Connely: 2014). Indonesia disebutkan memiliki empat prioritas politik luar negeri yakni memajukan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, meningkatkan peran di tingkat global dalam diplomasi negara *middle power*, meningkatkan keterlibatan di Indo Pasifik dan diplomasi ekonomi.

Pendapat lainnya politik luar negeri di era Joko Widodo ini menempuh pendekatan baru yang disebut called "*diplomasi pro-rakyat*" or "*pro people diplomacy*" (Andika:2016). Dengan mengambil jalan ini yang berbeda dengan politik luar negeri era Soesilo Bambang Yudhoyono yang sangat menekankan peran Indonesia di dunia internasional, politik luar negeri pro rakyat ini menjadi *inward focus style*. Disebutkan bahwa

Indonesia menempatkan kepentingan rakyat menjadi pusat diplomasi Indonesia.

Dengan memperhatikan sejumlah pandangan bahwa dengan bersandar kepada konsep bahwa politik luar negeri Indonesia sangat lekat dengan kepentingan nasional menghadirkan dirinya negara baik di dalam maupun di luar negeri seperti terlihat dalam kerangka kebijakan maka keselamatan warga di luar negeri menjadi perhatian. Demikian juga karena kepentingan domestik Indonesia juga memiliki kepentingan meningkatkan kerjasama bilateral baik di tingkat regional maupun internasional. Pencarian vaksin dengan jalan kerjasama menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia yang muncul dengan konsep melindungi penduduk sebenarnya bagian dari apa yang disebut Holsti (1992:83) tujuan politik luar negeri untuk meraih kesejahteraan. Dengan instrument diplomasi juga maka kerjasama juga diarahkan untuk meraih manfaat untuk warga negaranya. Dalam konteks pencarian vaksin yang digencarkan Indonesia setelah sekitar empat bulan covid-19 ini mewabah ada kecenderungan pencarian dilakukan keluar negeri juga dengan cara menggandeng kerjasama bilateral.

Dengan konsep bahwa politik luar negeri Indonesia menyandarkan kepada perlindungan WNI di luar negeri maka artikel ini akan mengkaji politik luar negeri semasa era Covid setidaknya sejak Januari dimana Covid dari Wuhan (China) mulai mewabah. Artikel ini berargumentasi bahwa politik luar negeri ketika wabah ini berjangkit, pertama, fokus dengan penyelamatan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Kedua, politik luar negeri diarahkan kepada kerjasama dalam menangani Covid-19 termasuk kolaborasi pencarian vaksin Covid-19 juga dalam konteks kepentingan menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi ini.

PENYELAMATAN

Respons Indonesia terhadap ancaman Covid-19 terhadap WNI di mancanegara sejalan dengan perkembangan yang terjadi di China yang mempengaruhi dunia. Perkembangan wabah Covid-19 ini berlangsung sangat cepat meskipun semula informasi dari China juga tidak transparan

mengenai wabah baru ini. Saat bulan Desember sudah muncul berbagai dugaan adanya wabah baru yang menyerang saluran pernafasan, China masih belum mengumumkan secara terbuka. Oleh karena itulah selama bulan Januari sampai bulan Februari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia belum menyadari bahaya dari virus corona ini. Bahkan WHO dalam perjalanan untuk mengetahui tingkat bahaya virus baru ini tidak segera mengumumkan pandemi sampai 11 Maret 2020.

Tabel 1: Perkembangan Covid-19

Tanggal	Deskripsi
31 Desember 2019	Dinas Kesehatan Kota Wuhan China melaporkan kluster baru pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei. Virus corona baru telah ditemukan.
1 Januari 2020	WHO membentuk IMST (Incident Management Support Team) di tiga level: markas besar, regional dan negara dalam kondisi darurat menghadapi keadaan darurat penyebaran wabah.
4 Januari 2020	WHO melaporkan dalam media sosial kluster baru pneumonia tanpa kematian di Wuhan, Provinsi Hubei.
5 Januari 2020	WHO memublikasikan pertama kalinya Disease Outbreak News mengenai virus baru. Didalamnya terdapat penilaian risiko dan anjuran serta meminta China melaporkan kepada WHO status pasien dan responsnya terhadap kluster pneumonia di Wuhan.
12 Januari 2020	China mengumumkan sekuens genetik COVID-19.
13 Januari 2020	Satu kasus resmi COVID-19 terkonfirmasi di Thailand, kasus pertama yang tercatat di luar China.
14 Januari 2020	WHO mencatat adanya penularan manusia ke manusia virus corona ini terutama melalui anggota keluarga dan berpotensi menular lebih luas.
22 Januari 2020	Misi WHO di China mengeluarkan pernyataan adanya bukti transisi manusia ke manusia di Wuhan namun perlu investigasi lebih lanjut.
22- 23 Januari 2020	Direktur Jenderal WHO Director- General mengadakan pertemuan darurat untuk mengkaji apakah berjangkitnya wabah menjadi darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Anggota pertemuan tidak mencapai konsensus.
11-12 Februari 2020	WHO mengadakan pertemuan Research and Innovation Forum on COVID-19 yang dihadiri lebih dari 400 pakar dan donatur dari seluruh dunia.
16-24 Februari 2020	Misi Gabungan WHO-China disertai pakar dari Kanada, Jerman, Jepang, Nigeria, Korea, Rusia, Singapura dan Amerika Serikat ke Beijing dan Wuhan berbicara dengan petugas kesehatan di Wuhan.
11 Maret 2020	WHO karena prihatin dengan tingkat penyebaran dan ancamannya mengumumkan bahwa COVID-19 adalah pandemi.

Sumber: WHO (2020)

Seperti tampak dalam tabel tersebut bahwa kasus virus corona sudah terdeteksi sejak Desember meskipun China masih bersikap tertutup. Bahaya virus baru ini juga belum terdeteksi sampai kemudian akhir Desember China mengumumkan nama virus baru dan kemudian korban pertama akibat virus bermunculan awal Januari di China. Lalu sejak 23 Januari Wuhan dikarantina sampai beberapa bulan kemudian sehingga WNI yang berada disana tidak dapat bergerak dan terancam keselamatannya.

Respons Indonesia ini tampak ketika WNI di Wuhan terperangkap karena merebak virus Corona sejak Desember 2019 dan dalam kondisi bahaya sejalan dengan informasi mengenai virus merebak dan kemudian mendunia (Hastangka dan Farid: 2020). Indonesia sendiri mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama kalinya pada 2 Maret 2020.

Indonesia memperhatikan keselamatan warga di luar negeri dalam konteks kebijakan luar negeri untuk melindungi WNI yang menjadi salah satu prioritas Indonesia. Dalam bahasa kebijakan pemerintah upaya repatriasi WNI sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai “menghadirkan negara” di kalangan warga Indonesia di mancanegara.

Adanya perhatian khusus terhadap WNI yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei, China yang menjadi pusat berjangkitnya pandemi Covid-19 tampak dari pernyataan Presiden Jokowi 31 Januari 2020 yang memerintahkan kabinet agar merepatriasi WNI dari sana (CNN Indonesia, 30 Januari 2020). Namun demikian perintah pemulangan WNI itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Dalam rencana operasi pemulangan ini TNI menyiapkan sejumlah pesawat untuk mendukung rencana pemulangan WNI dari Provinsi Hubei.

Kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri juga ikut memberikan perhatian penuh terhadap nasib WNI ini apakah mereka dipulangkan atau bertahan di tempatnya sekarang. Semuanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena setelah Maret dan kemudian April tidak ada tanda-tanda pandemic Covid-19 ini mereda. Dalam waktu singkat lebih dari 100 negara terkena wabah ini sehingga juga menekan Indonesia untuk mengetahui tingkat penyelamatan warga yang berada di luar negeri.

Tidak terkecuali di negara yang jauh dari sumber Vodi-19 seperti di Amerika Serikat, pembahasan Cvodi-19 difokuskan pada kondisi warga negara Indonesia di New York City dan sekitarnya. Menurut Anshory (2020) prioritas utama Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York ketika pandemi global Covid-19 adalah perlindungan WNI di Amerika Serikat. Tampak pada tanggal 18 Maret 2020, seluruh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat bersama-sama melakukan koordinasi untuk menanggapi dan meminimalisasi dampak penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat. Selain PTRI untuk PBB di New York, ada enam perwakilan Indonesia di Amerika Serikat yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI San Francisco, dan KJRI Houston ikut memfokuskan perhatian kepada upaya perlindungan dan penyelamatan WNI di Amerika Serikat.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah, perlindungan WNI di luar negeri ketika Covid-19 dijalankan dengan menggunakan *hotline* perwakilan Indonesia serta aplikasi digital bernama *safe-travel*. Aplikasi tersebut menyajikan berbagai pemberitahuan dan informasi yang diperlukan WNI selama di luar negeri. Apa yang terjadi di New York merupakan refleksi dari politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan keselamatan WNI di luar negeri. Namun berbeda dengan dari wilayah lain seperti China, hampir tidak ada repatriasi dari Amerika Serikat meskipun angka positif Covid-19 di Amerika Serikat termasuk tertinggi di dunia yang pada awal September 2020 mencapai enam juta positif Covid-19 dari sekitar 26 juta kasus di dunia (WHO:2020).

Data yang disebutkan Kementerian Luar Negeri sampai Juli 2020 penyelamatan dan pemulangan WNI sampai Juli 2020 mencapai 123.319 orang yang berasal dari 53 negara. Dari Malaysia sendiri yang dipulangkan selama era Covid-19 mencapai 88.710 orang (Berita Satu Tanggal 7 Juli 2020). Dari Wuhan sendiri data menunjukkan setidaknya lebih dari dua ratus orang diungsikan dan dipulangkan ke Indonesia (Kemlu: 2020).

Pemulangan WNI tidak hanya yang berada di lokasi Wuhan (China) tetapi juga berbagai negara yang banyak pekerja migran seperti dari Hongkong, Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan pemulangan dengan fasilitasi dari pemerintah dilakukan terhadap para pekerja Indonesia yang berada di kapal pesiar. Menurut Kementerian Luar Negeri dalam data yang dirilis Juni 2020, sekitar 21.000 WNI yang bekerja di kapal pesiar telah dipulangkan ke Indonesia akibat Covid-19 ini (Kompas, 2 Juni 2020).

Selain memulangkan WNI, Indonesia juga mengambil kebijakan melakukan pemantauan terhadap WNI yang terpapar covid-19 di mancanegara. Data yang dismapaikan Kementerian Luar Negeri sampai 30 Agustus menunjukkan jumlah warga yang terpapar covid-19 sekitar 24 ribu orang.



Gambar 1: Perlindungan WNI yang Positif Covid-19

Sumber: Kemenlu (2020)

Dari data itu, kebijakan perlindungan menjadi utama dalam pelaksanaan politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo. Data yang terungkap menunjukkan 1370 WNI yang positif covid-19 di berbagai negara termasuk data yang meninggal. Upaya memantau keselamatan WNI di luar negeri sebenarnya hal yang biasa bagi semua pemerintahan. Namun dengan adanya skala prioritas dalam kebijakan luar negeri ini maka berbagai

aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri juga menjadi tinggi seperti selain menangani pengobatan juga memberikan santunan kepada sejumlah WNI yang terkena lockdown sehingga pendapatannya berkurang atau mengalami kesulitan hidup. Laporan dari Kemenlu menyebutkan, sampai 1 Juli 2020, total bantuan yang disalurkan untuk WNI di seluruh dunia mencapai 522.086 paket dengan jumlah terbanyak untuk WNI di Malaysia yang mencapai 451.098 paket (Antara, 2 Juli 2020).

Operasi pemulangan WNI dari luar negeri karena pandemi Covid-19 ini bukanlah hal yang ringan. Data Kementerian Luar Negeri Oktober tahun 2017 menunjukkan Jumlah WNI di luar negeri mencapai 2.934 (Kemenlu:2017). Namun jumlah WNI sebenarnya bisa dua kali lipat karena banyak yang tidak melaporkan diri ke kantor perwakilan RI. Di Malaysia, data resmi dari Kemenlu pekerja migran di Malaysia mencapai sekitar 1,3 juta orang namun angka sebenarnya bisa mencapai 2,6 juta karena banyak yang tidak terdaftar atau bekerja secara ilegal.

Muhammad Harpin (2020) menyebutkan bahwa dalam upaya penyelamatan WNI ini, Indonesia perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara yang mencatat jumlah kasus WNI terkonfirmasi COVID-19 tinggi, terutama Malaysia, India, dan Singapura. Evakuasi pekerja migran, mahasiswa, anak buah kapal, dan pengunjung asal Indonesia dari Tiongkok, Malaysia, serta Arab Saud sudah merupakan langkah yang tepat.

Pemulangan WNI dari mancanegara yang dilanda bahaya seperti pandemi Covid-19 ini sudah menjadi salah satu ciri politik luar negeri Indonesia era Presiden Joko Widodo. Dalam penyelamatan warga yang terkena konflik di Suriah misalnya, Indonesia mengambil sikap pro aktif untuk mengungsikan warga dari daerah yang berbahaya. Demikian juga pemulangan warga dari Malaysia dilakukan secara terus menerus kepada mereka yang bermasalah.

KERJASAMA

Selain penyelamatan warga di luar negeri sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang menghadirkan negara, Indonesia menjadikan basis penyelamatan WNI sebagai cara pencarian vaksin melalui kerjasama

bilateral. Apa yang dikatakan Sukawarsini Djelantik (2020) perlunya berbagai negara memanfaatkan diplomasi kebencanaan, maka Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan sejumlah negara dan swasta dalam pencarian vaksin Covid-19.

Sukawarsini Djelantik (2020) menyebutkan, salah satu poin kerjasama internasional dalam menghadapi Covid-19 ini adalah membangun saluran komunikasi antara kelompok ilmuwan yang memiliki keahlian khusus, ahli medis dan profesional lainnya yang relevan termasuk ahli kemasyarakatan dan kebijakan. Dengan semakin meluasnya pandemic Covid-19, kebutuhan untuk kerjasama internasional untuk menangani baik masalah kesehatan dan krisis ekonomi telah menjadi hal yang perlu dibahas.

Diplomasi Indonesia untuk mendorong kerjasama ini tampak dalam pertemuan ASEAN. Seperti dijelaskan Muhamad Haripin (2020) dalam kesempatan 25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC) April 2020, Menlu Indonesia menyampaikan empat poin penting. Pertama, Indonesia mendorong implementasi hasil pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN dan ASEAN+3. Kedua, Indonesia mengajukan usul agar kesepakatan "Supply Chain and Flow of Goods during the Outbreak" dibahas dalam forum KTT ASEAN+3. Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN, termasuk pekerja migran, dengan memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, Indonesia mengusulkan pengumpulan ASEAN COVID-19 Response Fund yang berasal dari ASEAN Development Fund serta ASEAN+3 Cooperation Fund untuk membiayai pembelian alat-alat medis dan kebutuhan lainnya.

Dalam forum kerjasama ASEAN tersebut tampak Indonesia mengusulkan kerangka kerjasama yang lebih luas. Tidak hanya penyelamatan warga masing-masing tetapi juga dalam pembiayaan dan pembelian alat-alat perlindungan kesehatan. Didalamnya secara implisit Indonesia berkeinginan juga bekerja sama dalam pengobatan Covid-19.

Keinginan kerjasama dalam mencari vaksin dan berbagai langkah dalam mengatasi Covid-19 ini telah menjadi posisi Indonesia sejak awal. Indonesia mengikuti forum International Coordination Group on COVID-

19 (ICGC). Di dalam forum ini Indonesia meminta kerja sama yang erat dan konkret dari tiap negara untuk bersama-sama menanggulangi dampak penyebaran Covid-19 bagi masyarakat. Indonesia menyatakan upaya kolektif dalam pembuatan dan penyaluran vaksin harus diiringi dengan koordinasi lebih lanjut dalam pemulihan ekonomi global pasca-pandemi.

Kerjasama pencarian vaksin Covid-19 ini dilakukan berbagai negara. Menurut data dari World Health Organization (WHO) 28 Agustus 2020 terdapat 33 kandidat vaksin yang sudah masuk tahap uji klinik dan 143 kandidat vaksin yang masih dalam tahap uji pra klinik di seluruh dunia.

Indonesia memiliki pemahaman komprehensif mengenai potensi vaksin yang sedang pada tahap uji coba ini. Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia memandang terdapat obat yang sedang diuji coba dalam melawan Covid-19 saat ini yakni remdisivir, liponavir/ritonavir, liponavir/ritonavir dikombinasikan dengan interferon, beta 1-a; dan chloroquine atau hydroxychloroquine.

Indonesia juga berpartisipasi dalam kerjasama pencarian vaksin dan uji coba obat Covid-19 seperti dijelaskan Menlu Retno Marsudi. Disebutkan antara lain *Kimia Farma* dengan *Gilead Science*, tengah menjajaki penggunaan remdisivir, yang saat ini sedang menunggu hasil uji klinis di Amerika Serikat. Kemudian terdapat *Biofarma* dengan *Lembaga Eijkman*, dalam pengembangan plasma darah untuk membantu pasien yang memiliki gejala sedang. Dan *Biofarma* dengan *Kemristek* dan *Lembaga Eijkman* telah membentuk konsorsium untuk pengembangan vaksin. Konsorsium ini juga akan berkolaborasi dengan mitra-mitra internasional.

Setidaknya terdapat empat kerjasama bilateral dalam pencarian vaksin Covid-19 ini. Pertama yang tampak karena juga melakukan uji coba tahap klinis di Indonesia adalah kerjasama Indonesia-China. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri BUMN, Erick Tohir dating ke Tiongkok untuk menetapkan kerjasama kedua negara dalam produksi vaksin Covid-19 yang diperkirakan akan produksi tahun 2021 (Kemlu:2020).

Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu China Wangyi serta melihat perusahaan

farmasi, yaitu *Sinovac*, *Sinopharm* dan *CanSino*. Kedua pihak juga menyepakati *essential business travel corridor arrangement* bagi pelaku bisnis dan perjalanan kedinasan secara aman. Tiongkok merupakan negara ketiga, setelah sebelumnya Indonesian menjalin pengaturan ini dengan UAE dan Korsel.

Dalam pertemuan itu, terjadi penandatanganan 2 perjanjian kerja sama antara *Bio Farma* dan *Sinovac* untuk penyediaan 40 juta dosis vaksin bagi Indonesia mulai November 2020 hingga Maret 2021, dan prioritas penyediaan vaksin oleh *Sinovac* bagi *Bio Farma* periode April – Desember 2021.

Dari pertemuan tersebut tampak bahwa kebijakan Indonesia memanfaatkan peluang secara pragmatis untuk memanfaatkan teknologi kesehatan yang maju di China untuk kepentingan dalam negeri yakni menjaga kesehatan warga negara melalui vaksinasi. Langkah Indonesia itu menunjukkan bahwa ketika peluang kerjasama itu dapat menguntungkan untuk memperoleh vaksin tanpa harus melakukan investasi penelitian maka untuk kepentingan dalam negeri yakni kesehatan publik langkah itu ditempuh Indonesia.

Yang menjadi perhatian dalam kerjasama ini terutama dengan China adalah menandai semakin dekatnya hubungan kedua negara yang akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, kerjasama erat antara perusahaan farmasi Indonesia dengan China akan menimbulkan ketidaknyamanan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Penyebabnya, kerjasama dalam jumlah besar yang akan melibatkan produksi vaksin puluhan juta unit tidak hanya merupakan skala ekonomi yang besar tetapi juga berdampak pada hubungan kedua negara secara politik yang dipandang semakin dekat. Menjadi catatan bahwa vaksin kerjasama dengan China ini akan diproduksi tahun 2021 dan Indonesia sudah memesan dalam jumlah besar. Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan nyaman dengan posisi yang semakin dekat dalam konteks kerjasama ini dengan China. Di tengah persaingan negara besar China dan Amerika Serikat, pendekatan terhadap satu kubu akan mempengaruhi kubu lainnya. Di sinilah Indonesia perlu memberikan pertimbangan mengenai kerjasama produksi vaksin dengan

China dan peluangnya dengan negara-negara Barat.

Konsekuensi kedua yang perlu dicatat ini adalah implikasi kedalam negeri yang masih menganggap China sebagai negara komunis yang terlibat dalam gerakan kudeta tahun 1966. Stigma ini masih kuat di kalangan sejumlah politisi dan para aktivis masyarakat sehingga dalam setiap pemilihan umum, isu China ini senantiasa muncul dan hilang kembali setelah pemilu berlalu. Penjelasan pemerintah mengenai manfaat kerjasama produksi vaksin ini dapat meredakan kecurigaan itu karena dari berbagai uji coba vaksin Covid-19, produk asal China ini termasuk yang paling cepat.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif ini juga tidak lepas dalam mencari vaksin yang akan menyelamatkan warga. Setiap pilihan Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain seperti dengan China akan membawa konsekuensi politik juga meskipun bidang yang digarap adalah kesehatan.

Oleh karena itulah maka kebijakan Indonesia untuk membuka kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan asing ini dapat ditafsirkan sebagai perwujudan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam konteks ini, selain dengan China kerjasama juga dilakukan dengan Uni Emirat Arab merupakan indikasi adanya kebijakan yang independen.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyaksikan penandatanganan dua perjanjian kerja sama antara G42, perusahaan teknologi Kesehatan UAE dengan Kimia Farma dan Bio Farma (Kemlu: 2020). Menurut Kementerian Luar Negeri, Kimia Farma dan G42 akan mengembangkan produk vaksin dengan lingkup kerja sama di bidang produk obat, layanan kesehatan, riset dan uji klinis, produksi vaksin dan lainnya. Sedangkan dengan Bio Farma, G42 akan menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan distribusi berbasis teknologi laser dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk screening Covid-19.

Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito dalam pertemuan dengan pihak berwenang di Uni Emirat Arab akhir Agustus 2020 menerima informasi bahwa pelaksanaan uji klinik tahap ketiga di UEA ditargetkan untuk diikuti oleh 22.000 peserta uji klinik dari 119 kebangsaan dengan melibatkan lebih dari 100 dokter dan tenaga farmasi, 1000 perawat

dan petugas laboratorium yang dilakukan di pusat uji klinik (Badan POM, 1 September 2020)

Dengan adanya kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam pelayanan kesehatan terkait Covid-19 ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menerima kerjasama yang memberikan manfaat langsung tanpa memilih negara tertentu. Apalagi Uni Emirat Arab ini adalah negara di Teluk Persia yang mayoritas penduduknya Islam maka diplomasi kerjasama Indonesia akan memberikan penyeimbangan dengan kerjasama dengan China.

Dalam melihat kerjasama internasional ini menarik juga disinggung mengenai kerjasama Indonesia dan Korea Selatan saat covid-19 ini. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini dilakukan melalui perusahaan PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan asal Korea Selatan, yakni Genexine, Inc. Genexine Inc adalah perusahaan obat biologi dan bioteknologi yang terdaftar di bursa Korea Selatan.

Kalbe dan Genexine sepakat untuk melakukan uji klinis GX-19 di Indonesia, yakni pengembangan vaksin DNA terhadap virus Corona baru oleh konsorsium dengan Genexine, Binex, the International Vaccine Institute (IVI), GenNBio, the Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), and Pohang University of Science & Technology (POSTECH). Kalbe Farma sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dengan Genexine Inc, membentuk PT Kalbe Genexine Biologic (KGBio), sebuah perusahaan joint venture untuk mengembangkan dan membuat bahan baku obat-obatan bioteknologi di Indonesia (Detikcom: 28 Mei 2020).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Uji klinis tahap pertama kerjasama PT Kalbe Farma dengan Genexine Consortium Korea Selatan sudah diluncurkan keduanya di Korea Selatan pada Juni 2020 (CNN Indonesia, 28 Juli 2020). Uji klinis tahap kedua dan rencananya akan masuk tahap ketiga pada September 2020 sampai Maret 2021. Bila uji klinis selesai, produksi ditargetkan mencapai 50 juta dosis per tahun dan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditargetkan keluar pada Agustus 2021.

Dengan fokus kerjasama sangat spesifik dengan Korea Selatan ini dan bahkan melalui perusahaan swasta kedua adanya perluasan peran non-state dalam kerjasama bilateral. Perlu dicatat bahwa produk Korea Selatan ini memiliki pendekatan berbeda dengan China dalam memproduksi vaksin Covid-19. Dengan dukungan dari pemerintah Indonesia maka perusahaan swasta juga terbuka dalam mengembangkan kerjasama pembuatan vaksin melawan Covid-19 yang diperkirakan baru dapat dimulai tahun 2021. Jadi dari sudut kerjasama internasional seperti ini akan berlangsung lama dan seharusnya menguntungkan kedua pihak.

Jadi dalam kasus kerjasama dengan Korea ini, Indonesia tampaknya memberikan dukungan kepada swasta yang melakukan kerjasama berbasiskan kepentingan bisnis yang dipayungi hubungan bilateral. Adanya jalinan kerjasama ini juga merupakan salah satu buah dari hubungan diplomatic kedua negara yang berlangsung lancar.

Kerjasama yang keempat yang disebut Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini berlangsung antara Bio Farma dengan Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemik (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation/CEPI). Ini merupakan sebuah kerja sama antar pemerintah dan swasta di tingkat global yang berbasis di Norwegia (CNN Indonesia, 28 Juli 2020). Bentuk kerja sama ini berupa transfer teknologi formulasi vaksin yang telah dikembangkan oleh CEPI ke Bio Farma. Targetnya, Bio Farma bisa menjadi satu dari daftar 10 perusahaan yang bisa memproduksi vaksin CEPI di masa mendatang.

Dari implementasi politik luar negeri Indonesia dalam membuka kerjasama ini dapat dilihat dalam istilah diplomasi jalur pertama yang difasilitasi perusahaan negara dan multi jalur yang mengikutkan perusahaan swasta. Dengan adanya kombinasi dalam bentuk kerjasama yang benar-benar antar swasta dan kemudian ada perusahaan milik negara dari Indonesia maka menjadi menarik untuk diikuti sejauh mana dampak dari kerjasama ini dalam hubungan bilateral.

Kerjasama Indonesia dengan beberapa negara dan aktor non-negara ini sebagai langkah yang didukung Martha (2020) karena merupakan bagian dari pemanfaatan diplomasi publik seperti yang dilakukan negara lain.

Martha menjelaskan Disebutkan bahwa Indoensia telah mengajak negara-negara lainnya untuk membangun kemitraan dan bekerjasama menekan penyebaran Covid-19. Kemitraan dalam saling tukar informasi, pengembangan penelitian, *clinical treatment*, *test practice*, hingga perlindungan warga negara ditawarkan Indonesia pada negara-negara anggota ASEAN.

KESIMPULAN

Politik Luar Negeri Indonesia yang merespon pandemi Covid-19 mencerminkan karakter politik luar negeri di bawah pemerintah Joko Widodo yang *inward looking*. Keselamatan WNI di luar negeri menjadi alasan kebijakan luar negeri memprioritaskan kepada keselamatan mereka. Repatriasi dan pemulangan WNI di daerah yang berbahaya pandemi Covid-19 dalam waktu sekitar lima bulan dari Maret sampai Agustus sudah mencapai lebih dari 120 ribu orang. Ini menunjukkan bahwa prioritas politik luar negeri melindungi WNI di luar negeri menjadi pendorong kebijakan luar negeri pemerintahan era Joko Widodo. Namun demikian sebenarnya jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah keseluruhan WNI yang berada di luar negeri yang mencapai hampir tuga juta orang. Demikian juga jumlah tersebut mungkin tidak sebesar yang seharusnya karena juga kemampuan pemerintah yang terbatas. Namun adanya langkah penyelamatan yang dilakukan sampai lebih dari seratur ribu orang merupakan peristiwa langka dalam kondisi dunia normal.

Demikian juga diplomasi kesehatan Indonesia di era Covid-19 ini menekankan kepada kerjasama internasional untuk memanfaatkan penemuan vaksin oleh negara atau perusahaan asing. Melalui kerjasama inilah Indonesia memiliki peluang memanfaatkan vaksi untuk menyelamatkan WNI di dalam negeri mulai tahun 2021.

Setidaknya Indonesia menjalin kerjasama dengan tiga pihak yakni China, Korea Selatan dan Uni emirat Arab melalui perusahaan negara atau perusahaan swasta. Kerjasama internasional ini juga kembali mengarah kepada kepentingan dalam negeri yakni penyediaan vaksin untuk melawan Covid-19 setelah diperkirakan dapat digunakan awal tahun 2021.

Pilihan kombinasi kerjasama dengan China, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab disengaja atau kebetulan merupakan indikasi adanya implementasi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kerjasama dengan China saja dapat menimbulkan persepsi di negara-negara Barat yang membenarkan semakin dekatnya hubungan politik kedua negara. Dengan adanya kerjasama dengan Korea Selatan dan negara lainnya dapat menjadi penyeimbang sehingga langkah diplomasi Indonesia melalui kerjasama pencarian vaksin Covid-19 ini tidak mengarah kepada munculnya masalah baru dalam politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan orientasi yang bebas dan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muhammad Fikry. (2020). Diplomasi Digital Sebagai Dampak Pandemi Global Covid-19: Studi Kasus Diplomasi Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala*. Vol 3. No 2. Januari-Juni 2020.
- Connelly, Aaron L. (2014). *Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi*. Sydney: Lowly Institute.
- Djelantik, Sukawarsini. (2020). Kerjasama Global Menangani The "Great Lockdown"; Pendekatan Diplomasi Multijalur. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Edisi Khusus April.
- Hastangka dan Muhammad Farid. 2020. Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Blogal: Studi Kasus Covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12.
- Holsti, K.J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall International.
- Jessica Martha. 2020. Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Edisi Khusus April 2020.
- Muhammad Haripin. Politik Luar Negeri Indonesia dan Pandemi Covid-19. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1369-politik-luar-negeri-indonesia-dan-pandemi-covid-19>. Diakses 1 September 2020.
- Purbantina, Adiasri Putri dan Renitha Dwi Hapsari. (2020) Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan Covid-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia. *Global & Policy* Vol.8, No.1, Januari-Juni 2020
- Rosyidin, Mohamad. (2017). Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century. *South East Asia Research* 1-17.
- Situmorang, Mangandar. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 11, No 1 (2015)
- Tri Andika, Muhammad. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 1-13
- Weatherbee, Donald E. Weatherbee. (2016). *Understanding Jokowi's Foreign Policy*. Singapore: Yusof Ishak Institute.
- Online**
- Antara. Hingga 1 Juli, 121.638 WNI kembali dari luar negeri Akibat Covid-19. Tanggal 2 Juli. <https://www.antarane.ws.com/berita/1586734/hingga-1-juli-121638-wni-kembali-dari-luar-negeri-akibat-covid-19paket>. Diakses 1 September 2020.
- Beritasatu. Tanggal 7 Juli 2020. Sejak Pandemi, 123.000 WNI Berhasil Dipulangkan ke RI. Dalam <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/dunia/653025/sejak-pandemi-123000-wni-berhasil-dipulangkan-ke-ri>. Diakses 1 September 2020.
- Badan Pom. Tanggal 1 September 2020. Dukong Percepatan Kerjasama Vaksin Covid-19, Badan POM Lakukan Kerjasama dengan Uni Emirat Arab. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/561/DUKONG-PERCEPATAN-KERJA-SAMA-VAKSIN-COVID-19---BADAN-POM-LAKUKAN-KERJA-SAMA->

- DENGAN-UNI-EMIRAT-ARAB.html. Diakses 2 September 2020.
- CNN Indonesia. *Jokowi Perintahkan Segera Evakuasi WNI di Wuhan*. Tanggal 30 Januari 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200130184224-32-470258/jokowi-perintahkan-segera-evakuasi-wni-di-wuhan>. Diakses 4 September 2020.
- CNN Indonesia. 28 Juli 2020. Empat Kerja Sama Pencarian Vaksin Corona dengan China-Korsel.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200728075412-92-529590/empat-kerja-sama-pencarian-vaksin-corona-dengan-china-korsel>. Diakses 1 September 2020.
- Detikcom. Soraya Novika. RI-Korsel Kerja Sama Produksi Vaksin COVID-19. Tanggal 28 Mei 2020.
<https://finance.detik.com/industri/d-5032675/ri-korsel-kerja-sama-produksi-vaksin-covid-19>. Diakses 4 September 2020.
- Kemlu.go.id Pemerintah RI Berhasil Pulangkan 243 Orang dari Wuhan, Tiongkok.
<https://kemlu.go.id/portal/idAkun/read/1011/berita/pemerintah-ri-berhasil-pulangkan-243-orang-dari-wuhan-tiongkok>
- Kemlu.go.id. Perkuat Kerja Sama Bilateral Menuju Kemandirian Nasional, Menlu RI dan Meneg BUMN Kunjungi Tiongkok dan UAE.
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1579/berita/perkuat-kerja-sama-bilateral-menuju-kemandirian-nasional-menlu-ri-dan-meneg-bumn-kunjungi-tiongkok-dan-uae>Tanggal 24 Agustus. Diakses 4 September.
- Who.int. *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*. Dalam <https://covid19.who.int/>. Tanggal 4 September 2020. Diakses 4 September 2020.